

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Belakangan sebuah tren berkembang di dunia di mana kaum muda menjadi semakin terlibat dalam gerakan-gerakan protes yang menunjukkan ketidakpuasan mereka pada kondisi sosial politik yang ada. Seperti didiskusikan oleh Yorulmaz (2018a), gejolak kaum muda (*youthquake*) ini terkait dengan kenyataan bahwa kehidupan generasi muda di berbagai belahan dunia telah disengsarakan oleh kondisi-kondisi yang ada pada masa kini. Mereka harus merasakan kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh *austerity regime* (rezim penghematan anggaran) neoliberal dan kesengsaraan karena perang-perang yang tidak pernah usai. Selain itu, mereka pula adalah generasi yang akan mewarisi dunia yang semakin rusak alamnya dan semakin tidak bisa ditinggali. Gejolak ini muncul karena kaum muda menyadari mereka tidak memiliki kontrol atas kehidupan mereka.

Krisis keuangan 2008 (*Great Recession*) menandai prolog dari tren yang disebutkan. Banyak negara di dunia mengalami resesi yang diakibatkan oleh krisis 2008. Dampak riil dari resesi dan bagaimana pemerintah di negara-negara ini meresponsnya bervariasi. Di Inggris, krisis 2008 menjadi awal kembalinya masa *austerity*. Menurut Hayes (2021), *austerity* adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan hutang sektor publik. Langkah-langkah yang diambil dapat berupa perolehan pendapatan (pajak

yang lebih tinggi) untuk mendanai pengeluaran, menaikkan pajak sambil memotong fungsi pemerintah yang tidak penting, atau pajak yang lebih rendah dan pengeluaran pemerintah yang lebih rendah.

Namun, seperti semua kebijakan pemerintah lainnya, *austerity* merupakan produk dari kekuasaan politik yang ada. Ekonom Paul Krugman (2015) berpandangan bahwa *austerity* bukanlah kebutuhan ekonomi melainkan kepentingan politik Partai Konservatif. Meskipun penelitian-penelitian ekonomi yang diduga mendukung didorongnya *austerity* telah didiskreditkan, elit Konservatif memanfaatkan dugaan bahaya utang dan defisit sebagai alat untuk mengalahkan model negara kesejahteraan dan membenarkan pemotongan anggaran yang berkaitan dengan publik seperti perlindungan sosial dan pendidikan.

Memberlakukan *austerity* berarti warga negara termasuk kaum mudanya diharuskan menanggung beban dari krisis yang tidak mereka sebabkan. Ini menimbulkan protes dari pihak yang dikorbankan. Terdapat banyak protes yang terjadi yang dimulai oleh kaum muda Inggris, seperti:

- Protes mahasiswa pada November 2010 yang dihadiri sekitar 50.000 orang menolak kenaikan biaya kuliah sampai 3 kali lipat setelah pemerintah koalisi Konservatif-Liberal mengumumkan rencana menaikkan batas tertinggi dari £3,290 menjadi £9,000 (Lewis, 2010). Protes yang dipimpin oleh mahasiswa ini juga dihadiri oleh demonstran lainnya, seperti buruh, pelajar, dan beberapa anggota parlemen. Protes ini dipandang sebagai

protes mahasiswa terbesar di Inggris dan merupakan permulaan dari rangkaian protes melawan kebijakan austerity yang berjalan hingga akhir dekade kedua abad ini (Smoke, 2020). Meskipun upaya mobilisasi yang luas dan bentrokan dengan polisi, kenaikan biaya kuliah ini tetap diberlakukan di hampir setiap universitas. Ini membuat para mahasiswa terbebani oleh hutang pendidikan yang lebih besar (Earle, 2018).

- Pendudukan gedung Hetherington House di Universitas Glasgow oleh mahasiswa pada Februari 2011 di mana mereka bertahan selama 6 bulan s.d. Agustus 2011. Pendudukan ini merupakan protes terhadap pemotongan anggaran universitas yang akan menghapuskan atau menggabungkan sejumlah departemen, meliputi antropologi, sastra dan bahasa modern, dan perawatan (Ferguson & Bain, 2011; Scott, 2011).
- Demonstrasi nasional #4Demands pada April 2016 yang diorganisir oleh People's Assembly Against Austerity, misalnya, sekitar 50.000 orang hadir menuntut diakhirinya austerity dan ditingkatkannya anggaran di bidang kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan (Burke, 2016).

Fenomena protes oleh kaum muda seperti ini juga teramati di berbagai belahan dunia, dari barat Amerika sampai timur Asia. Berikut adalah kasus-kasus di antaranya:

- Di Amerika Serikat, ini ditandai dengan berkembangnya gerakan Occupy pada tahun 2011. Occupy Wall Street adalah pendudukan Zuccotti Park di Distrik Keuangan Manhattan yang memprotes pengaruh yang merusak

dari bank-bank besar dan perusahaan multinasional atas proses demokrasi (Fleming, 2011). Gerakan Occupy kemudian meluas ke berbagai kota dan negara bagian dan kini memberikan inspirasi bagi perjuangan politik untuk melawan tatanan politik yang menciptakan ketidaksetaraan ekonomi (Olla, 2011). Occupy Wall Street mengangkat slogan “We are the 99%” (Kami kaum 99%) untuk menunjukkan bahwa gerakan Occupy merupakan gerakan mayoritas ‘melawan kaum 1 persen terkaya yang menulis aturan ekonomi global yang tidak adil yang menyita masa depan kita’ (Occupy Wall Street, n.d.). Gerakan Occupy dapat dikatakan sebagai gerakan kaum muda karena di setiap kota yang diduduki (*occupied*) banyak pemuda-pemudi dapat ditemukan dalam gerakan ini.

- Di Turki, ini tampak khususnya pada demonstrasi Gezi tahun 2013. Demonstrasi Gezi adalah protes yang bermula dari sekelompok aktivis yang mencoba menghentikan penghancuran Taman Gezi, salah satu ruang hijau yang tersisa di Istanbul. Protes yang berjalan damai ini, namun, ditanggapi dengan brutalitas polisi anti huru-hara yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjung rasa. Berita tentang serangan itu menyebar luas dengan cepat melalui media sosial. Kerusuhan kian menyebar ke lebih dari 70 kota di Turki, termasuk ibu kota Ankara. Tertanggal 7 Januari 2013, tiga orang telah meninggal, 4.000 terluka dan 900 telah ditangkap (Harding, 2013; Letsc, 2013). Demonstrasi Gezi dapat dikatakan sebagai gerakan protes kaum muda karena setengah dari

partisipannya berusia kurang dari 30 tahun (Turgut, 2013, para. 7). Demonstrasi Gezi juga menimbulkan kesadaran baru mengenai salah satu masalah politik di Turki, yaitu tentang orang-orang Kurdi. Kaum muda Turki mulai berpikiran jika negara Turki bisa berlaku seperti itu di Istanbul apa yang terjadi di Kurdistan dan dialami rakyat Kurdi pastilah lebih buruk dari itu (Yorulmaz, 2018b, bag. “Elite fears”).

- Di India, ribuan mahasiswa Jawaharlal Nehru University (JNU) pada November 2019 memprotes kenaikan biaya asrama sampai 13 kali lipat dari kisaran 120 dan 240 rupee menjadi kisaran 1800 dan 3600 rupee. JNU adalah universitas yang dikelola oleh pemerintah dan banyak diminati karena biaya pendidikannya yang jauh lebih murah daripada universitas swasta. Namun, kenaikan biaya asrama ini sangat berdampak terhadap mahasiswa, khususnya mereka yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Hampir 8000 mahasiswa atau sebanyak 60% tinggal di kampus. Survei oleh mahasiswa menyebutkan 42% mahasiswa berada di bawah pendapatan rumah tangga tahunan yang sebesar 144.000 rupee (“JNU: Protesters”, 2019).
- Di Chile, para pelajar SMA berkumpul di stasiun metro kota Santiago pada Oktober 2019 untuk melakukan protes damai terhadap kenaikan tarif transportasi. Protes ini kemudian meluas dan berkembang menjadi protes terhadap biaya hidup yang tinggi, upah yang rendah, kurangnya akses pendidikan, sistem kesehatan publik yang buruk, dan ketidasetaraan yang

semakin parah. Jutaan orang dari berbagai kota berpartisipasi dalam protes ini. Namun, protes ini ditanggapi dengan kekerasan oleh negara melalui deklarasi keadaan darurat dan pengiriman tentara ke jalanan (McGowan, 2019; Conca-Cheng, 2019).

- Dan berbagai protes di negara-negara lainnya.

Fenomena protes melibatkan kaum muda juga terjadi di Indonesia. Gerakan protes di berbagai kota yang melibatkan mahasiswa dan pelajar tampak meningkat sebelum dan setelah pengesahan produk hukum kontroversial Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mendapat sorotan negatif dan diprotes karena bermasalah dari sisi aturan-aturan yang terkandung di dalamnya maupun dari proses pembuatannya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Wardana (2020) menyebutkan UU Cipta Kerja melonggarkan aturan-aturan untuk pengusaha terkait ketenagakerjaan dan lingkungan dan mengizinkan negara menjadi lebih represif terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu pencapaian target-target ekonomi. Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar (dalam tulisan Yahya, 2021) bersaksi di Mahkamah Konstitusi bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan tidak transparan.

UU Cipta Kerja, namun, hanyalah salah satu dari banyak undang-undang dan peraturan yang diprotes oleh masyarakat, seperti UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Minerba, UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Pemasyarakatan (Putsanra, 2019). Masalah dari undang-undang seperti

UU Minerba dan UU Cipta Kerja, selain dapat digunakan untuk melakukan kriminalisasi, juga memuat: (1) fleksibilitas perubahan spasial yang memudahkan investasi ekstraktif berdiri di daerah rawan bencana, (2) memberikan jaminan perpanjangan otomatis untuk kontrak pertambangan besar sehingga tidak ada peluang untuk memperbaiki alokasi konsesi yang terletak di daerah berisiko bencana tinggi (3) sentralisasi kewenangan untuk memfasilitasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merongrong ruang wilayah dan menempatkan kajian risiko bencana di daerah di bawah kepentingan pemerintah pusat dan pengusaha saja (Indonesia Revolutionary, 2021, para. 11). Maka, UU Cipta Kerja dalam hal ini juga merupakan ancaman bagi upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup.

Sejak itu juga, hadir protes-protes yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, protes itu di antaranya adalah kritik oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada yang menominasikan presiden sebagai “Alumnus Paling Memalukan. Ini dilakukan pada sesi penutup diskusi bertajuk “Rezim Monarki Sang Alumni: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, dan Kokohnya Politik Dinasti” yang terlaksana pada 8 Desember 2023 (Regar, 2023). Sebelumnya pada Mei 2023, BEM Universitas Indonesia (UI) menyampaikan kritik yang menyebut “Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat.” Sebutan itu mengkritik presiden yang telah menyalahgunakan fasilitas negara untuk melayani kebutuhan partai politik bukannya untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Dua tahun sebelumnya, BEM UI juga menyampaikan kritik terhadap presiden dengan

menyebut “Jokowi The King of Lip Service”, bahwa presiden dipandang suka menyebarkan janji manis tetapi realitasnya berbeda (Muhid, 2023).

Protes oleh kaum muda ini bagaimanapun terkait dengan kenyataan bahwa meskipun identitasnya “dirayakan media”, tetapi “suram realitasnya”. Pada Februari 2021, setidaknya terdapat 3,8 juta pengangguran dari rentang usia 15-24 tahun (rentang usia yang disebut sebagai Generasi Z) yang mana jumlahnya hampir setengah dari total pengangguran yang mencapai 8,7 juta. Bahkan di antara mereka yang dapat bekerja pun, upahnya rendah di mana rata-rata upah Gen Z usia 15-19 dengan rata-rata 44 jam kerja per minggu sebesar Rp1,5 juta/bulan. Sementara Gen Z usia 20-24 dengan rata-rata 42 jam kerja per minggu rata-rata mendapat upah Rp 2,1 juta/bulan. Kelompok umur milenial (25-29 tahun) juga bernasib sama, meskipun sedikit lebih baik. Di balik berbagai mitos yang dibangun media dan pemerintah tentang generasi muda yang kreatif, terpelajar, pandai teknologi, dsb., terdapat realitas generasi muda yang kehidupannya tidak seperti sosok-sosok muda kelas menengah-atas yang dimitoskan (Kresna, 2022).

Dihadapkan dengan kurangnya demokrasi dan penguatan kontrol negara atas kehidupan warganya (Mudhoffir, 2021), kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk (Wijaya, 2021) dan reforma-reforma neoliberal yang mempersulit kondisi tersebut (Prakash, 2020), serta krisis ekologis yang kian memburuk (Featherstone, 2021) dan keengganan elit politik untuk mengatasinya (Gerakan Buruh Bersama Rakyat, 2023), kaum muda menemukan dirinya dalam keharusan



untuk bertindak segera untuk tidak hanya memperbaiki kondisi yang rusak hari ini, tetapi juga menentukan arah baru bagi kehidupan yang lebih baik. Kaum muda untuk mewujudkan ini perlu partisipasi politik yang lebih luas, lebih dari memprotes ketidakadilan tetapi juga mengubah tatanan kehidupan yang memproduksinya.

Berdasarkan contoh-contoh di atas, fenomena protes kaum muda yang disebabkan oleh keresahan mereka pada kondisi-kondisi yang tidak berpihak pada mereka dapat dikatakan telah menjadi fenomena global. Tetapi ada hal positif yang teramati pula yang didorong oleh fenomena tersebut. Hal positif ini adalah kepercayaan kaum muda akan perubahan kondisi politik dan partisipasi mereka dalam upaya perubahan tersebut. Dalam kasus luar negeri, ada beberapa yang dapat disebutkan sebagai berikut.

Di Inggris, banyak kaum muda bergabung ke dalam organisasi Momentum. Momentum adalah organisasi akar rumput yang bergerak untuk mempopulerkan gagasan dan kebijakan sosialis melalui kampanye dan pendidikan politik serta melakukan pengorganisasian guna memajukannya ke dalam Labour Party (Momentum, n.d.). Didirikan pada Oktober 2015, satu bulan setelah diumumkannya Jeremy Corbyn menjadi pemimpin Labour Party, Momentum telah memiliki 60.000 orang pendukung yang diorganisir terutama melalui media sosial dan memiliki 50 kelompok lokal pada tahun yang sama. Keanggotaannya dari tahun ke tahun meningkat dengan sebanyak 40.000 orang telah bergabung pada April 2018. Banyak dari keanggotaan ini adalah dari kelompok kaum muda

yang terorganisir setelah kemenangan Corbyn dalam kontestasi kepemimpinan Labour Party tahun 2015 (Smith, 2015; Cowburn, 2018; Simons, 2016).

Tersatukan oleh nasib yang sama sebagai pihak yang dikorbankan oleh *austerity*, banyak kaum muda Inggris yang tergabung dalam protes mahasiswa tahun 2010-2011 kemudian dapat ditemukan dalam berbagai organisasi politik yang memperjuangkan alternatif dari *austerity*, seperti Momentum, sayap pendukung Jeremy Corbyn, dan media alternatif. Para pemuda ini tertarik ke dalam keaslian dan komitmen pada diri Corbyn yang tidak dimiliki oleh politisi lain (Earle, 2018). Corbyn sendiri adalah seorang sosialis dan mengatakan bahwa hanya program politik yang radikal yang dapat mengakhiri *austerity*, ketidaksetaraan, dan kemiskinan (Settle, 2015). Momentum yang memiliki gagasan yang sama, sejak didirikan, telah secara konsisten mendukung Jeremy Corbyn dan Labour Party di bawah kepemimpinannya.

Di Amerika Serikat, bangkitnya partisipasi politik kaum muda terkait dengan berkembangnya gerakan Occupy dan organisasi Democratic Socialists of America. Kontribusi penting gerakan Occupy adalah menyuntikkan ke dalam diskursus nasional sebuah fokus pada meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan secara tajam sejak krisis ekonomi tahun 2008. Lebih jauh ia mengenalkan kaum muda kepada politik kiri dan gagasan progresif (Harrington, 2019; Olla, 2021). Kaum muda yang kebanyakan mengambil hutang besar untuk melanjutkan pendidikannya di universitas (lihat Friedman, 2022) dalam hal ini menjadi kekuatan utama dalam kampanye Bernie Sanders dan Democratic Socialists of

America (DSA). DSA, organisasi yang mewadahi individu-individu sosialis dengan beragam pandangan, mendukung Sanders yang melalui kampanye-kampanyenya menjalin hubungan dengan para pemuda pendukung Sanders yang telah mengadopsi sebutan “democratic socialist” yang juga digunakan oleh Sanders (Harrington, 2019).

Banyak dari pendukung Sanders yang tetap aktif di DSA dan mendirikan puluhan cabang-cabang baru termasuk cabang-cabang Young Democratic Socialists di SMA-SMA dan universitas-universitas (Harrington, 2019). Polling menunjukkan kaum muda—milenial dan terutama generasi Z—memiliki pandangan yang lebih positif atas sosialisme daripada generasi sebelumnya. Mereka juga memiliki ketertarikan pada isu-isu seperti kebijakan imigrasi, krisis iklim, kesetaraan rasial, masalah penembakan massal, dan akses pada layanan kesehatan (Kight, 2019). Kaum muda melalui kampanye, pemberian suara, dan dukungan lainnya mendorong Sanders untuk maju sebagai kandidat presiden Partai Demokrat tahun 2020. Statistik dari Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (2020) menunjukkan ada peningkatan partisipasi yang lebih tinggi dari kaum muda daripada tahun-tahun sebelumnya dan mayoritas dari mereka memilih Sanders daripada Joe Biden. Pada pemilihan tahun 2016, mayoritas kaum muda juga memilih Sanders daripada Hillary Clinton.

Di Turki, kaum muda yang terlibat dalam demonstrasi Gezi adalah kaum muda yang suaranya menyumbang keberhasilan Peoples' Democratic Party meraih

80 kursi (13% suara), melampaui ambang batas parlemen 10%, pada pemilu tahun 2015 (Yorulmaz, 2018a, bag. “Gezi Resistance”; Nardelli, 2015). Peoples' Democratic Party (*Halkların Demokratik Partisi / HDP*) adalah partai politik yang memperjuangkan demokrasi partisipatoris, perdamaian, egalitarianisme, dan hak-hak perempuan, LGBT, dan minoritas, serta perlindungan lingkungan (“Peoples' Democratic Party”, n.d.). HDP juga adalah partai yang bersimpati kepada revolusi yang sedang berkembang di Rojava yang dipandang telah membawa alternatif kehidupan baru yang egalitarian bagi tidak hanya orang-orang Kurdi tetapi juga untuk orang-orang Arab, Turkoman, Asyur, dan Armenia (Central Executive Board, 2021).

Yang membedakan HDP dari partai lainnya di parlemen adalah proses demokratis partisipatoris yang ditekankannya. HDP sendiri adalah partai politik yang dibentuk oleh People's Democratic Congress. Seperti disebutkan dalam situs jejaringnya (Halkların Demokratik Kongresi, 2016), People's Democratic Congress adalah sebuah organisasi perserikatan yang berupaya menyatukan semua kekuatan demokrasi dan perdamaian, anti-fasis, serikat buruh, organisasi buruh dan profesional, organisasi masyarakat, gerakan perempuan, pemuda, dan LGBTI di Turki dan Kurdistan untuk membentuk satu kekuatan oposisi terhadap kekuasaan Erdoğan (para. 2).

Penulis dan penerjemah Yorulmaz (2018a) menyebutkan HDP adalah satu-satunya partai di parlemen yang mendorong massa pemilihnya untuk terlibat secara mendalam dalam politik lokal. HDP menegaskan pentingnya memeluk

politik dalam segala bidang kehidupan dan tidak menyerahkan politik kepada birokrasi dan kotak suara. Majelis-majelis rakyat (*popular assemblies*) di Rojava yang dibela HDP dan pendukungnya merupakan model demokrasi yang memiliki tradisi panjang dalam politik kiri radikal (bag. “Gezi Resistance”; lihat Altinörs, 2017). Demonstrasi Gezi, seperti halnya gerakan Occupy di Amerika Serikat dengan *general assembly*-nya (lihat Schneider, 2011), adalah gerakan yang diorganisir menurut sistem mejelis rakyat (lihat Tahaoğlu & Yöney, 2013).

Di Chile, Gabriel Boric terpilih menjadi presiden termuda berusia 35 tahun. Boric adalah mantan aktivis mahasiswa. Dalam kampanyenya, Boric menyatakan akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang inklusif kaum muda untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ia juga berjanji akan memerangi iklim dengan menghentikan usulan proyek penambangan di negara penghasil tambang terbesar di dunia ini (Bartlett, 2021). Kaum muda di banyak tempat di dunia tampak lebih bersimpati pada dan menjadi bagian dalam gerakan-gerakan politik progresif.

Di Indonesia, partisipasi politik kaum muda lebih banyak mengambil bentuk keterlibatan di luar politik elektoral. Salah satunya, seperti disebutkan oleh peneliti Nowak (2021), adalah pencampuran aktivisme politik dengan budaya kaum muda alternatif. Band *punk rock* Superman is Dead yang bersolidaritas dan terlibat dengan gerakan sosial tolak reklamasi di pantai Bali pada tahun 2015 adalah contohnya. Musisi dan kelompok band bawah tanah mengembangkan

ikatan pertemanan dan akan turun ke jalan ketika ada masalah politik yang menarik perhatian mereka (hal. 12).

Berikutnya adalah aktivisme digital dan partisipasi protes. Penggunaan tanda pagar (*hashtag*) di media sosial dalam upaya membuat viral suatu isu politik tertentu adalah contohnya. Hal ini dilakukan dalam gerakan #TolakOmnibusLaw (Sastramidjaja & Radisi, 2021) dan #ReformasiDikorupsi (Prasetyo, 2020) yang terjadi belakangan. Terdapat pandangan di antara aktivis perempuan bahwa aktivisme daring dapat menjadi awalan kepada aktivisme di dunia nyata (The Finery Report, 2021). Saud & Margono (2021), dalam penelitian mereka terhadap mahasiswa di Yogyakarta, Malang, Madura, dan Surabaya, menemukan bahwa kaum muda terlibat dalam berbagai aktivitas protes karena dipengaruhi oleh konsumsi media mereka, khususnya media digital.

Mengenai politik elektoral, dari banyak partai yang akan ikut serta dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024, hanya dua partai yang dapat dikatakan ‘progresif’ dan masing-masing memiliki masalahnya sendiri, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Buruh (PB). PSI sekalipun mengklaim sebagai partai milik kaum muda dan beretorika progresif liberal (lihat Mudhoffir, 2018) mendukung Joko Widodo pada tahun 2019 yang dikritisi oleh banyak kaum muda dan masyarakat sipil. Sementara PB, seperti didiskusikan dalam Indoprogres TV (2023), adalah partai politik yang didirikan oleh inisiatif Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan serikat lainnya. PB memiliki platform

yang progresif, tetapi asal usulnya yang terpisah dari gerakan rakyat yang menyeluruh membuatnya kurang mendapat simpati (37:25).

Masalah yang ada terkait representasi progresif dalam politik elektoral sepertinya berdampak terhadap kurangnya entusiasme kaum muda Indonesia untuk terlibat dengan partai politik jika dibandingkan dengan kasus-kasus luar negeri yang jelas representasi progresifnya. Seperti telah disinggung sebelumnya, kaum muda mendukung: Jeremy Corbyn dan Labour Party di Inggris, Bernie Sanders dan Democratic Party di Amerika Serikat, People's Democratic Party di Turki, dan Gabriel Boric di Chile. Sementara, kaum muda Indonesia memberikan suara (meskipun cenderung golput; lihat Aminuddin & Ramadhan, 2022), tetapi, seperti didiskusikan oleh anggota Serikat Mahasiswa Progresif UI Azmi (2022), masih terdapat antipati terhadap partai politik, bahkan yang dibentuk oleh sesama kaum muda sendiri (Partai Mahasiswa Indonesia).

Tentu, tidak seluruh kaum muda berpikiran demikian. Kesadaran akan pentingnya partai politik dalam gerakan perubahan sosial yang progresif sebetulnya ada di kalangan kaum muda mahasiswa. Tulisan Azmi dan teman-temannya (lihat Apinio, 2022) tidak hanya menunjukkan keberadaan kaum muda yang memiliki kesadaran ini, tetapi juga suatu bentuk intervensi yang datang dari kalangan muda mahasiswa sendiri untuk mengubah “cacat berpikir” tentang politik dan partai politik.

Mengenai ketertarikan kaum muda pada politik, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi digital tampaknya memiliki peranan penting. Secara

umum terdapat kaitan antara penggunaan teknologi digital, seperti media sosial, dan partisipasi politik kaum muda. Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center (2018) di 14 negara di Asia (salah satunya Indonesia), Afrika, Amerika Latin, dan Eropa menunjukkan bahwa kaum muda berusia 18-29 tahun kurang aktif dalam memberikan suara daripada generasi yang lebih tua, tetapi lebih aktif mengomentari isu-isu sosial atau politik secara daring. Kaum muda tampak lebih termotivasi melakukan tindakan politis untuk isu-isu yang beragam, seperti isu kebebasan berpendapat, diskriminasi, korupsi pemerintah, kualitas pendidikan, dan kualitas layanan kesehatan. Pengguna media sosial lebih bersedia melakukan tindakan politik untuk membela kebebasan berpendapat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi disertai oleh partisipasi politik yang lebih tinggi.

Di Indonesia, protes-protes terhadap UU Cipta Kerja diorganisir memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial. Protes ini membesar menjadi protes nasional di berbagai kota dan diikuti banyak kaum muda karena upaya kaum muda mengorganisir di antara teman-temannya untuk bergabung dan dimungkinkan dengan penyebaran propaganda dalam berbagai bentuk melalui kanal-kanal daring media sosial dan obrolan (Shalihah, 2020; Prasetyo, 2020). Protes yang viral juga telah teramati lebih menarik diikuti oleh kaum muda yang perhatian dengan politik ataupun isu-isu sosial dan lingkungan dan ini bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia (Jarvis, 2021). Protes-protes yang terjadi baik di jalanan (luring) maupun di media sosial (daring) memanfaatkan



teknologi digital untuk mendukung penyebaran informasi dan ajakan berpartisipasi.

Namun, terpaan informasi terkait politik di media tidak selalu bisa diandalkan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Aktivitas media tidak terpisahkan dari kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik di sekitarnya. Media arus utama umumnya dimiliki oleh kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Riau Yasir (2016) menyatakan konglomerasi media berbahaya karena menimbulkan keseragaman isi tayangan dan memberikan keleluasaan bagi pemilik media untuk menggunakan medianya untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan publik. Dalam penelitian terhadap 22 program dialog di televisi, Santosa et al. (2022) menemukan program dialog memberikan ruang lebih bagi elit daripada publik dalam mendiskusikan isu kontroversial terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain itu, pemerintahan juga dikuasai oleh kelompok elit yang sama yang menjadikan pemerintahan berkarakter oligarkis (lihat Redaksi Indoprogress, 2023). Pada kenyataannya, pemerintah sendiri secara aktif berupaya mengontrol narasi atau opini publik terkait omnibus law UU Cipta Kerja melalui bombardir informasi-informasi yang sepihak dan pembungkaman suara-suara kritis. Peneliti dari Universitas Amsterdam dan Universitas Indonesia Sastramidjaja & Rasidi (2021) menyebutkan pemerintah menerapkan strategi pengawasan cyber (*cyber-surveillance*) yang terpadu dan mengerahkan pasukan cyber (atau lebih dikenal

sebagai *buzzer*) terhadap pihak-pihak yang menolak untuk meredam gerakan anti-Omnibus Law.

Penggunaan *buzzer* tidak terbatas pada kasus Omnibus Law, tetapi tampak dalam kasus-kasus gerakan sosial lainnya. Misalnya dalam kampanye #BoikotAice, pegiat serikat buruh Sarinah (2021) mengungkapkan ‘BuzzeRp’ dikerahkan untuk menyerang akun-akun buruh dan aktivis serikat yang berkampanye memprotes kesenjangan upah, beban kerja berat, kasus buruh keguguran, buruh kontrak, dan buruh *outsourcing* di perusahaan es krim AICE. Sarinah mengamati bahwa akun-akun *buzzer* ini adalah akun yang sama yang mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK, produk hukum yang ditolak oleh masyarakat. Ridho Al-Hamdi (dalam Suryarandi, 2022) dari Pengurus Pusat Muhammadiyah mengungkapkan penggunaan *buzzer* juga terjadi dalam kasus Desa Wadas. *Buzzer* digunakan untuk memutarbalikkan fakta seolah-olah tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (lihat Saiful & Sholecha, 2022) dan krisis sosio-ekologis dalam rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Mereka yang berpartisipasi dalam protes, maka, tidak mengandalkan informasi dari media/saluran arus utama. Para partisipan protes memanfaatkan saluran-saluran informasi alternatif yang umumnya dikembangkan oleh para aktivis gerakan sosial. Teknologi media digital memfasilitasi pengembangan saluran semacam ini. Kecanggihan pemerintah dan elit politik-ekonomi dalam meredam gerakan pun ditanggapi dengan kecakapan digital partisipan dan

solidaritas antarsesama. Peran kecakapan ini, yang umumnya disebut sebagai literasi digital, adalah penting dalam penyebarluasan pesan-pesan kritis dan perlawanan (kontra-hegemoni). Khususnya di antara kaum muda, kehidupan serba digital mereka berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi politik mereka. Mahasiswa studi filsafat Hyronimus (2019) menyebut “politik ala generasi Z” sebagai politik yang bermula “dari media sosial menuju gerakan nyata.”

Maka, dunia digital adalah salah satu arena pertempuran di mana perjuangan politik terjadi. Baik gerakan sosial rakyat dan elit berkuasa saling memanfaatkan ruang digital ini. Tetapi, terdapat perbedaan dalam tujuan keduanya. Yang pertama menyadari potensi teknologi digital untuk menggerakkan masyarakat kepada perubahan sosial yang progresif, yang kedua memandangnya sebagai sarana untuk memobilisasi dukungan di bilik suara (sehingga kekuasaannya tampak legal) dan pengalihan perhatian agar status quo terjaga. Jika kaum muda benar-benar menginginkan perubahan sosial-politik yang berarti, ia harus mengambil kontrol atas dunia digital ini bersama-sama dengan gerakan sosial perubahan. Kaum muda yang lekat dengan budaya internet/digital (*digital native*) punya keunggulan kekuatan dalam pertempuran ini jika disertai bekal kesadaran politik yang mendukung.

Fenomena protes kaum muda yang disebutkan menunjukkan pembentukan kesadaran politik yang radikal. Seperti didiskusikan oleh Muxel (2020), kesadaran politik radikal, atau radikalisme politik, kaum muda terkait dengan semakin berkembangnya kesadaran akan perlunya perubahan yang mendalam di

masyarakat (hal. 124). Dalam konteks hari ini, mereka yang memiliki kesadaran politik radikal progresif adalah mereka yang melakukan perlawanan terhadap rezim *austerity* neoliberal yang menyengsarakan hidup orang banyak dan kaum muda, dengan visi mengubah kondisi hari ini kepada tatanan yang lebih baik (Prasetyo, 2020; Allen, 2021). Sebagaimana telah diuraikan di atas, kaum muda menjadi kekuatan penting dalam perjuangan politik perubahan yang progresif dan radikal di berbagai negeri.

Partisipasi politik kaum muda terjadi baik di dunia nyata (luring) maupun di dunia maya/digital (daring). Sebagai *digital native*, partisipasi mereka banyak melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mendukungnya, khususnya dalam aspek komunikasinya seperti penyebaran informasi dan ajakan berpartisipasi. Maka, kecakapan kaum muda menggunakan teknologi digital dan radikalisasi politiknya berperan dalam partisipasi politik mereka.

Namun, teramati di beberapa negara luar negeri, keberadaan representasi politik progresif adalah penting untuk menarik energi kaum muda kepada partisipasi politik perubahan. Masalah terkait representasi politik progresif yang ada di Indonesia menimbulkan hambatan dalam mengerahkan secara lebih besar potensi partisipasi politik mereka. Dalam hal ini, pengaruh dari kecakapan digital kaum muda yang disertai formasi kesadaran politik radikal progresifnya terhadap partisipasi politik bisa saja tidak se-signifikan itu dari yang dikira.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Belakangan terjadi fenomena protes-protes oleh kaum muda di berbagai negeri termasuk Indonesia yang didorong oleh kondisi sosial politik yang ada yang tidak berpihak kepadanya. Ini pada saat yang sama menimbulkan radikalisme politik di mana kaum muda semakin mengembangkan kesadaran akan perlunya perubahan mendalam di masyarakat. Pembentukan kesadaran berpolitik radikal ini mendorong mereka untuk melakukan partisipasi politik karena partisipasi penting untuk menciptakan perubahan politik yang berarti. Partisipasi ini dilakukan baik secara luring dan daring. Partisipasi ini didukung dengan kecakapan mereka menggunakan teknologi digital, khususnya pada aspek komunikasinya seperti penyebarluasan informasi-informasi kritis dan perlawanan, serta ajakan kepada sesama untuk berpartisipasi dalam gerakan-gerakan sosial.

Namun, masalah yang ada di Indonesia terkait representasi politik progresif dapat membatasi pengerahan potensi partisipasi politik kaum muda. Ini karena di banyak tempat (luar negeri) keberadaan representasi politik progresif memainkan peranan penting menarik energi kaum muda kepada partisipasi politik perubahan. Peran kecakapan kaum muda menggunakan teknologi digital yang disertai dengan formasi kesadaran politik radikal progresifnya dalam mendorong baik partisipasi yang dimediasi teknologi dan partisipasi langsung di dunia nyata bisa saja cukup terbatas atau tidak se-signifikan itu dan masih perlu diteliti. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu apakah terdapat

pengaruh radikalisme politik progresif dan tingkat literasi digital terhadap tingkat partisipasi politik luring dan daring.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh radikalisme politik progresif dan tingkat literasi digital terhadap tingkat partisipasi politik luring dan daring.

### **1.4. Signifikansi Penelitian**

#### **1.4.1. Secara Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana pengaruh radikalisme politik progresif dan literasi digital terhadap partisipasi politik luring dan daring kaum muda. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi komunikasi politik, khususnya yang dimediasi teknologi digital, yang tepat dalam meningkatkan partisipasi politik di antara kaum muda.

#### **1.4.2. Secara Akademis**

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan disiplin ilmu komunikasi, khususnya *uses, gratification, dependency theory* dalam aplikasinya untuk memahami radikalisme politik progresif, literasi digital, dan partisipasi politik luring dan daring.

### **1.4.3. Secara Sosial**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai radikalisme politik progresif, literasi digital, dan partisipasi politik luring dan daring. Wawasan ini menghadirkan cara pandang berbeda dalam melihat fenomena sosial dan komunikasi, khususnya yang melibatkan kaum muda.

## **1.5. Kerangka Teori**

### **1.5.1. State of The Art**

Pertama, penelitian berjudul *Political Radicalization as A Communication Process* (Radikalisasi Politik sebagai Sebuah Proses Komunikasi) yang dilakukan oleh Joseph Woelfel, John Woelfel, James Gillham, dan Thomas McPhail (1974). Penelitian itu menginvestigasi hipotesis bahwa radikalisasi politik adalah sepenuhnya konsekuensi dari proses komunikasi yang mana berada dalam wilayah penelitian komunikasi. Sebuah teori komunikasi mengenai radikalisasi politik diajukan yang berpendapat bahwa sejauh mana setiap individu memiliki pandangan politik radikal adalah sebuah fungsi linier sederhana sejauh mana dia telah terpapar kepada sebagian besar informasi yang mendukung pandangan seperti itu. Sampel penelitian adalah 412 mahasiswa di Monreal, Quebec, Canada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap yang dipegang oleh anggota sampel dijelaskan dengan baik oleh rata-rata tertimbang dari informasi yang mereka terima dari sumber interpersonal dan media. Sikap yang dihasilkan menunjukkan

efek substansial pada perilaku yang terkait dengan separatisme Quebec (pandangan politik radikal) untuk responden yang sama.

Kedua, penelitian oleh Ririn Khoiriyah, Sudarno, dan Feri Setyowibowo (2022) berjudul Pengaruh Literasi Digital, Efikasi Diri dan Lingkungan Terhadap Intensi Berwirausaha *E-Business* Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh tiga variabel independen—literasi digital, efikasi diri, dan lingkungan—terhadap variabel dependen intensi dalam berwirausaha *e-business*. Teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behaviour yang dikembangkan oleh Ajzen. Penelitian kuantitatif ini memilih sampel sejumlah 241 mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret angkatan 2017-2019. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan tiap variabel independen—literasi digital, efikasi diri, dan lingkungan—memiliki pengaruh terhadap intensi berwirausaha *e-business*.

Ketiga, penelitian oleh Devianti Anggraini, Aang Wahyu Ariesta, dan A. G. Eka Wenats Wuryanta (2022) berjudul Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden RI 2019. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap partisipasi politik pemilih pemula, dan mengetahui seberapa besar partisipasi politiknya. Penelitian ini didasarkan pada teori bahwa terpaan media akan mempengaruhi perubahan sikap seseorang. Terpaan informasi dari sumber yang dipercaya secara teoritis akan meningkatkan pengetahuan khalayak



dan kemudian akan menimbulkan perubahan sikap. Sikap didefinisikan sebagai “predisposisi perilaku dari komponen kognitif, afektif, dan konatif terhadap suatu obyek tertentu” (hal. 4). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data memanfaatkan kuesioner. Sampel dari penelitian ini adalah 150 orang mahasiswa S1 Universitas Paramadina jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2015 dan 2016 yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat besaran pengaruh positif yang signifikan penggunaan media jejaring instagram terhadap tingkat partisipasi politik remaja.

Keempat, penelitian berjudul *Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw* (Partisipasi politik kaum muda dan gerakan digital di Indonesia: kasus #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw) yang dilakukan oleh Sri Lestari Wahyuningroem, Rheinhard Sirait, Uljanatunnisa Uljanatunnisa, dan Dudy Heryadi (2023). Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara partisipasi politik kaum muda, media digital, dan perkembangan identitas politiknya. Penelitian menggunakan metode *social network analysis* untuk menganalisis data kuantitatif yang didapat dari Twitter dari Oktober 2019 s.d. November 2020. Penelitian menemukan bahwa kaum muda memainkan peran aktif dan penting dalam membangun gerakan luring dan daring. Secara khusus, gerakan daring menyumbang kepada perkembangan gerakan protes luring dan sebaliknya.

Kelima, penelitian oleh Muhammad Saud, Rachmah Ida, Ansar Abbas, Asia Ashfaq, dan Araz Ramazan Ahmad (2020) berjudul *The Social Media and Digitalization of Political Participation in Youths: An Indonesian Perspective* (Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik di antara Kaum Muda: Perspektif Indonesia). Tujuan penelitian adalah menginvestigasi kontribusi dan preferensi kaum muda terhadap partisipasi politik dalam diskusi kontemporer di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori *public sphere* (ruang publik) dari Habermas yang menyatakan mengenai penggunaan ruang-ruang publik untuk berdiskusi tentang hal-hal bersama, khususnya isu-isu politik. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan *purposive random sampling* yang datanya dikumpulkan dengan survei daring. Mayoritas responden adalah mahasiswa dari universitas-universitas. Penelitian menemukan bahwa media sosial dan *Social Networking Sites* (SNSs) menyediakan platform unik untuk mendiskusikan masalah-masalah politik dan ‘terlibat’ dalam diskusi politik.

Penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas. Persamaan terletak pada topik yang diteliti di mana ada tiga penelitian memasukkan partisipasi politik sebagai variabel penelitian, dua di antaranya dalam konteks digital, dan ada empat penelitian meneliti tentang interaksi dengan media. Hanya penelitian pertama yang meneliti radikalisme politik dan hanya penelitian ke-2 yang meneliti variabel literasi digital. Kesamaan lain berada pada metodologi penelitian, yaitu berupa penelitian kuantitatif. Tetapi, sekalipun topik yang diteliti sama (partisipasi politik dan interaksi dengan media),

banyak di antara variabel dari penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis.

Adapun teori-teori yang digunakan di penelitian-penelitian sebelumnya adalah teori komunikasi mengenai radikalisme politik berdasarkan terpaan informasi media dan *peer group*, *theory of planned behaviour*, teori mengenai pengaruh terpaan informasi media, *network theory*, *theory of public sphere* dari Habermas, dan teori mengenai aktivisme digital dan demokrasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan *Uses, Gratification, and Dependency Theory*. Meskipun berbeda, teori ini masih dalam tradisi teoritis yang sama dengan teori mengenai terpaan informasi media, yaitu tradisi efek media. Maka, penelitian yang selanjutnya ini menerapkan *Uses, Gratification, and Dependency Theory* untuk menjelaskan pengaruh radikalisme politik progresif dan tingkat literasi digital terhadap tingkat partisipasi politik luring dan daring.

### **1.5.2. Paradigma Penelitian**

Paradigma dari penelitian ini adalah paradigma positivistik. Menurut Baxter & Babbie (2003), penelitian positivistik memiliki ciri-ciri, meliputi; penggunaan pengamatan empiris untuk menjelaskan realitas obyektif; studi atas variabel-variabel; pengembangan teori yang memungkinkan prediksi, penjelasan, dan kontrol; pencarian hukum-hukum yang digeneralisasi; dan pengamatan dalam bentuk data kuantitatif (hal. 48).

### 1.5.3. Radikalisme Politik Progresif

Radikalisme berasal dari kata bahasa Latin *radix* yang berarti akar (“*radix*”, n.d.) atau radikal yang berarti memiliki akar (“*radikalis*”, n.d.). Radikalisme berarti menyentuh atau sampai ke akar. Sebuah politik yang radikal adalah politik yang menyentuh akar dari suatu masalah. Lebih dari itu, politik radikal juga ‘mencabut’ (*root out*) dalam artian mendefinisikan ulang bagaimana masyarakat berfungsi (Pugh, 2009, hal. 2; “*root out*”, n.d.). Pembentukan pemikiran radikal modern erat kaitannya dengan Pencerahan (*Enlightenment*) yang dikenal di Eropa (McLaughlin, 2012). Penggunaan kata-kata ini—radikal, radikal, dan radikalisme—dalam artian politik sudah mulai ada sejak akhir abad ke-18 (“*Classical radicalism*”, n.d.).

Secara historis, “radikalisme” – gerakan politik bernama Radikalisme – menjadi penanda bagi orang-orang yang tercerahkan, memiliki prinsip politik yang liberal sampai sayap kiri, dan menentang kemapanan politik reaksioner. Di Eropa pada awal abad ke-19, radikalisme merujuk kepada doktrin politik yang menginspirasi gerakan nasional dan republikan yang berkomitmen kepada emansipasi dan kebebasan kolektif yang menentang kekuasaan aristokratis dan monarkis. Radikalisme memegang teguh prinsip pro-demokrasi dan seringkali anti kekuasaan gereja. Beberapa punya tuntutan yang telah menjadi mainstream pada abad ke-20 seperti hak pilih perempuan. Radikalisme dalam hal ini berkaitan erat dengan reformisme progresif daripada ekstrimisme utopian. Kaum radikal pada umumnya menolak glorifikasi kekerasan massal (Bötticher, 2017, hal. 74).

Dalam bahasannya mengenai radikalisme politik kaum muda, Muxel (2020) menyebutkan kecenderungan radikal merujuk pada baik sikap-sikap dan perilaku individu dan kelompok, serta penciptaan sekumpulan makna dan tindakan yang menyeluruh yang diekspresikan dalam cara-cara yang beragam. Ia membedakan antara parameter kognitif (sikap dan pendapat) dan faktor yang mendorong tindakan itu sendiri (*behaviour*/perilaku). Pendapat radikal diekspresikan sebagai nilai dan kepercayaan, sementara tindakan radikal berarti melakukan tindakan konkrit/nyata baik dalam konteks legal (seperti partisipasi demonstrasi atau bergabung dengan organisasi radikal) dan dalam konteks ilegal (seperti tindak kekerasan, perusakan properti, dan mungkin terorisme). Meskipun kaitan antara keduanya cukup jelas, pendapat radikal lebih umum daripada tindakan radikal. Dalam rentang antara keduanya, terdapat beragam ekspresi dan tindakan politik yang beragam. Dalam hal ini, radikalisme lebih baik dipahami sebagai *continuum* (rentang/rangkaian; hal. 124-125).

Radikalisme politik dapat merujuk baik radikalisme yang berkarakter progresif dan radikalisme berkarakter reaksioner atau ekstrimisme. Perbedaan antara radikalisme yang pertama dari yang kedua telah didiskusikan oleh Bötticher (2017). Menurutnya, meskipun radikalisme (progresif) dan ekstrimisme merupakan posisi yang jauh dari politik moderat atau arus utama dalam masyarakat demokratis, posisi moderat atau tengah ini dapat bergeser seiring waktu. Letak keduanya dalam konsesus demokratis adalah bahwa radikalisme dapat berada di tepian konsesus ini, sementara ekstremisme berada di luarnya.

Sistem politik demokratis telah menunjukkan kemampuannya untuk menyerap tuntutan radikal dengan mencapai kompromi-kompromi. Namun, sistem demokrasi dan masyarakat plural tidak bisa berkompromi dengan ekstrimis karena ia memiliki ‘tuntutan dogmatis yang didasarkan pada kontruksi ideologis berbasis agama yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam realitas sosial’ (hal. 76).

Radikalisme politik progresif dalam hal ini mengarah pada terciptanya suatu jenis gerakan sosial tertentu. Macionis (2012) mendefinisikan gerakan sosial sebagai aktivitas yang mendorong atau menghambat perubahan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud meliputi pula gerakan politik. Menurutnya, terdapat empat macam gerakan sosial:

- *alternative social movement*, menciptakan perubahan kecil pada sebagian kecil populasi;
- *redemptive social movement*, menciptakan perubahan besar pada sebagian kecil populasi;
- *reformative social movement*, menciptakan perubahan kecil pada seluruh populasi;
- dan *revolutionary social movement*, menciptakan perubahan besar pada seluruh populasi (hal. 548-549).

Jenis gerakan sosial yang timbul dari radikalisme politik progresif seperti dijelaskan oleh Bötticher termasuk ke dalam jenis *reformative social movement*, yaitu gerakan sosial yang menginginkan perubahan sosial terbatas yang menarget atau berpengaruh bagi semua orang. Secara spesifik, jenis gerakan ini dapat

berkarakter progresif atau reaksioner. Dalam radikalisme politik progresif, karakter dari gerakan ini adalah progresif, yang berarti mempromosikan terciptanya pola-pola sosial baru di masyarakat. Meskipun tidak menyangsikan kemungkinan untuk munculnya jenis gerakan lainnya (seperti *alternative* dan *revolutionary*), gerakan sosial yang timbul dari radikalisme politik progresif dalam banyak kasus membawa agenda perubahan yang ada dalam gerakan sosial *reformative*.

Radikalisme politik didefinisikan oleh Muxel (2020) sebagai ‘berpegang pada gagasan atau perilaku yang mengandaikan perlawanan terhadap permainan politik dan institusi politik yang biasa, bersama dengan strategi protes anti-sistem yang terang-terangan, mulai dari protes hingga kekerasan’ (hal. 129). Bötticher (2017), memberikan penekanan pada tujuan atau visi yang ingin dicapai, mendefinisikannya sebagai ‘suatu doktrin politik yang dipeluk oleh gerakan-gerakan sosio-politik yang mendukung baik kebebasan individu dan kolektif, serta emansipasi dari kekuasaan rezim otoriter dan masyarakat yang terstruktur secara hierarkial’ (hal. 74-75). Maka, radikalisme politik progresif adalah orientasi berpolitik yang menentang cara berpolitik dan institusi politik yang mapan/ada, menggunakan strategi protes anti-sistem dari protes hingga kekerasan, serta mendukung kebebasan individu dan kolektif dalam masyarakat yang lebih setara/egalitarian. Berdasarkan definisi tersebut, radikalisme politik progresif terdiri dari tiga hal:

- 1) orientasi berpolitik yang menentang cara berpolitik dan institusi politik yang mapan/ada,
- 2) orientasi berpolitik yang menggunakan strategi anti-sistem dari protes hingga kekerasan politik, dan
- 3) orientasi berpolitik yang mendukung kebebasan individu dan kolektif dalam masyarakat yang lebih setara/egalitarian.

Dalam mengukur orientasi yang pertama, penelitian ini mengadopsi pengukuran *external efficacy* yang dikembangkan oleh Craig & Magiotto (1982). *External (political) efficacy* adalah ukuran kepercayaan seseorang terhadap institusi politik. Kurangnya efikasi eksternal berarti seseorang memandang pemerintah dan institusi-institusi yang ada tidak responsif terhadap kebutuhan publik (Miller et al., 1980 dalam Craig & Magiotto, 1982, hal. 86). Efikasi eksternal yang rendah relevan dengan radikalisme politik karena, seperti disebutkan oleh Craig & Magiotto, orientasi kepada protes politik lebih umum di antara orang yang tinggi efikasi internalnya—kepercayaan positif untuk berpolitik dan membuat perubahan politik (hal. 85)—tetapi rendah efikasi eksternalnya (hal. 100). Kaitan antara radikalisme politik dan partisipasi protes telah teramati dalam penelitian-penelitian, misalnya yang dilakukan oleh Pickard et al. (2020) dan Corry & Reiner (2020) terkait aktivisme lingkungan.

Untuk orientasi kedua, penelitian ini mengadopsi *Activism and Radicalism Intention Scale (ARIS)* yang dikembangkan oleh Moskalenko & McCauley (2009). ARIS mengukur intensi seseorang untuk melakukan aktivisme legal



(*activism*) dan aktivisme ilegal (*radicalism*). ARIS relevan dengan radikalisme politik karena dalam rentangan radikalisme politik terdapat ekspresi politik radikal yang beragam yang dapat dilakukan dalam lingkup legal dan ilegal. Moskalenko & McCauley juga menemukan bahwa komitmen yang sama pada perubahan politik dapat mengambil metode aktivisme nir-kekerasan atau dengan kekerasan/ilegal (hal. 255-257). Meskipun aktivisme legal tampak bukan strategi anti-sistem dibandingkan aktivisme ilegal, keduanya dapat menjalankan fungsi anti-sistem yang sama. Seperti disebutkan oleh Kaufman (2003), perubahan melalui politik mikro (aktivisme legal) dapat menjadi strategi tekanan internal untuk memperkuat dan memenangkan perubahan yang lebih radikal (hal. 296-299). Pilihan seseorang untuk apakah menggunakan aktivisme legal, aktivisme ilegal, tidak sama sekali atau keduanya sekaligus adalah pertanyaan tentang komitmennya.

ARIS memiliki poin-poin pengukuran melibatkan identifikasi seseorang kepada kelompok sosial tertentu. Kelompok sosial ini tidak terbatas pada kelompok berdasarkan identitas sosial (agama, etnisitas, bangsa/negara, gender, dsb.), tetapi meliputi juga kelompok ekonomi (serikat buruh, petani, pengangguran, dsb.) dan politik (demokrat, libertarian, republikan, dsb.). Dalam konklusinya Moskalenko & McCauley (2009) menyatakan ARIS dapat digunakan untuk asesmen intensi aktivisme legal dan ilegal dalam suatu kelompok sosial atau kelompok dengan tujuan politik (hal 246, 253, 257). Karena yang diteliti oleh penelitian ini adalah radikalisme politik progresif, identifikasi kelompok yang

dimaksud adalah dengan kelompok politik radikal progresif yang tujuan politiknya adalah emansipasi.

Tujuan emansipasi ini dapat mengambil berbagai bentuk pemikiran politik radikal. Seperti dikatakan McLaughlin (2012) dalam studi filosofisnya atas radikalisme, para filosof politik radikal telah sejak awal membicarakan tentang ‘distribusi mendasar atas kekuasaan sosial-politik’ yang meliputi di dalamnya pertanyaan tentang ekonomi, politik, dan budaya, serta tentang ideologi dan tentang kelas-kelas sosial-ekonomi (hal. 201). Perbedaan di antara beragam pemikiran politik radikal progresif adalah perbedaan dalam memandang apa arti emansipasi, meliputi radikalisme pencerahan, radikalisme utopis, radikalisme sosialis, radikalisme Marxian, radikalisme anarkis, radikalisme anti-kolonial, radikalisme ekologis, dan radikalisme feminis (hal. 40-103, 110-121, 127-133). Maka, poin-poin pernyataan dalam ARIS seperti “*I would join/belong to an organization that fights for my group’s political and legal rights*” (Saya akan bergabung/menjadi anggota organisasi yang berjuang untuk hak-hak hukum dan politik kelompok saya) diubah menjadi “Saya akan bergabung/menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan agenda politik progresif yang emansipatoris.”

Sedangkan orientasi yang ketiga mengadopsi pengukuran *anti-egalitarianism* yang dikembangkan oleh Ho et al. (2015). *Anti-egalitarianism* adalah ukuran ‘preferensi seseorang terhadap ketidaksetaraan antarkelompok yang dipertahankan melalui suatu jaringan kebijakan sosial dan ideologi hierarkis yang halus’ (hal. 1004). Berdasarkan pengukuran ini, nilai *anti-egalitarianism* yang

rendah berarti nilai egalitarianisme yang tinggi. Masalah (anti-)egalitarianisme dan keadilan sosial ditemukan berkaitan oleh penelitian-penelitian, misalnya yang dilakukan oleh Hoyt et al. (2023) terkait keadilan rasial dan oleh Sidanius et al. (2020) terkait keadilan gender. Maka, penelitian ini mengadopsi pengukuran *external efficacy* dari Craig & Maggioto (1982), *Activism and Radicalism Intention Scale* dari Moskalenko & McCauley (2009), dan pengukuran *anti-egalitarianism* dari Ho et al. (2015) dalam mengukur radikalisme politik progresif.

#### **1.5.4. Literasi Digital**

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah menjangkau dunia dan menghubungkan orang-orang dengan cara yang baru. Karenanya, setiap orang tidak hanya harus belajar menggunakan teknologi baru tetapi juga belajar bagaimana berinteraksi satu sama lain dengan teknologi tersebut. Teknologi baru ini adalah teknologi komunikasi dan informasi digital. Kehadiran teknologi digital memungkinkan orang-orang dari berbagai tempat saling terhubung melalui internet, medium digital dan platform daring (Spires et al., 2018, hal. 2235; Spires et al, 2019 dalam Amin, 2021, hal 24). Teknologi digital banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti berkirim surat elektronik (*e-mail*), membaca buku elektronik (*e-book*) dan konten-konten daring, dan berpartisipasi dalam diskusi yang dilaksanakan secara daring. Penggunaan teknologi digital telah semakin luas di dalam berbagai bidang

aktivitas meliputi pendidikan, ekonomi, budaya, relasi sosial, dan politik (Amin, 2021, hal. 25; Subiakto & Ida, 2014, hal. 73-74)

Secara tradisional istilah literasi digunakan untuk menyebut kecakapan membaca dan menulis yang penting bagi pengembangan diri (Rintaningrum, 2009, hal. 3-4). Istilah ini juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan teknologi digital untuk mendeskripsikan teknik-teknik membaca dan menulis dalam berbagai bentuk format media (teks, pameran visual, grafik bergerak, audio, video) yang difasilitasi oleh teknologi digital (Fieldhaus, 2008 dalam Spires et al., 2018, hal. 2235). Tetapi, keduanya tetaplah jenis literasi yang berbeda. Kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan dalam literasi digital berbeda dan lebih dari sekadar membaca dan menulis. Literasi digital dalam hal ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pengetahuan dan keterampilan seseorang terkait penggunaan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi (Spires et al., 2018, hal. 2235).

Terdapat beragam kerangka teoritis yang ada untuk menjelaskan literasi digital. Keberagaman ini muncul karena ada keberagaman definisi dari literasi digital di mana setiap definisi memiliki perspektif dan penekanan tertentu. Definisi-definisi paling awal menekankan pada kecakapan fungsional atau kemampuan untuk menggunakan, berkomunikasi, dan menciptakan (*to use, communicate, and create*) memanfaatkan teknologi dan platform digital. Definisi kontemporer memandang penting untuk memasukkan aspek-aspek sosial dan etis ke dalam definisi literasi digital. Literasi digital dalam hal ini lebih dari akses dan

kemampuan menggunakan teknologi digital melainkan juga bagaimana menggunakannya secara benar. Literasi digital hari ini penting agar tidak hanya orang-orang menjadi semakin cakap menggunakan teknologi digital tetapi dapat menggunakan secara etis dan bertanggung jawab (Amin et al, 2021, hal 26-27).

Penelitian ini mengadopsi Indeks Literasi Digital yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam pengukuran literasi digital. Dari empat sub-indeks, hanya sub-indeks 1 (Informasi dan Literasi Data) dan 2 (Komunikasi dan Kolaborasi) yang digunakan untuk keperluan penelitian ini. Dua sub-indeks tersebut meliputi 4 pilar literasi digital, yaitu:

- Informasi dan Literasi Data,
- Berpikir Kritis,
- Kemampuan Berkomunikasi, dan
- Etika dalam Teknologi.

#### **1.5.6. Partisipasi Politik Luring**

Politik adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ini dikarenakan politik memiliki dampak yang menentukan bagi setiap orang. Politik dapat dipahami dalam dua cara, yaitu (1) sebagai tindakan sosial yang dibentuk melalui penggunaan kekuasaan dan (2) sebagai fungsi sosial untuk mengorganisir kehidupan sosial bersama (*social coexistence*) dan pemerintahan. Cara pandang pertama memahami politik sebagai instrumen yang seringkali melibatkan manipulasi, sinisme, pemaksaan, dan kekerasan. Cara pandang kedua memahami

politik sebagai bagian dari suatu visi tentang masyarakat yang ingin dicapai (Morlino et al., 2017, hal. 1-2).

Definisi yang paling luas dari politik adalah definisinya Adrian Leftwich (dalam Leftwich, 2015). Menurutnya, politik meliputi segala aktivitas kerja sama, negosiasi, dan konflik yang terjadi di dalam dan di antara masyarakat-masyarakat di mana orang-orang melakukan pengorganisasian atas penggunaan, produksi, atau distribusi dari sumber-sumber daya manusia, alam, dan lainnya untuk tujuan produksi dan reproduksi kehidupan biologis dan sosialnya (bab 7, bag. 3). Definisi yang sederhana adalah definisinya B. Guy Peters (dalam Leftwich, 2015). Menurut Peters, politik adalah tentang pemerintahan (*politics is about governing*). Tujuan utama dari politik dalam hal ini adalah menjalankan pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik (bab 2, bag. 1).

Politik terbagi dalam tiga *level* (tingkatan): makro, meso, dan mikro. Politik pada level mikro (*micropolitics*) merujuk pada politik yang dilakukan oleh warga negara dalam upaya mempengaruhi keputusan-keputusan politis. Istilah yang lebih dikenal untuk menyebutnya adalah partisipasi politik (Morlino et al., hal. 20, 161). Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi proses politik. Sebagai aktivitas, partisipasi politik mewujud dalam tindakan-tindakan (seperti pemberian suara, penandatanganan petisi, atau demonstrasi) dan bukan sekadar tertarik dengan politik saja. Partisipasi ini merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh warga negara biasa (bukan politisi, pelobi, pejabat, atau pegawai negeri) secara sukarela.

Partisipasi politik berkaitan dengan hal-hal terkait pemerintahan, politik, atau negara dalam artian luas dan tidak terbatas pada fase-fase (seperti proses pembuatan atau pelaksanaan undang-undang) atau area-area (seperti pemilu atau kontak dengan pejabat partai) tertentu dari proses politik (Sobiakto & Ida, 2012, hal. 71; van Deth, 2021, hal. 2-3).

Partisipasi politik mengalami evolusi dari masa ke masa. Model awal dari partisipasi politik pada awal tahun 1960-an disebut sebagai “konvensi” di mana pemerintah, politisi, publik, dan warga negara mengadakan pertemuan-pertemuan dan kampanye-kampanye terbuka. Konvensi ini memberikan ruang terbuka bagi keterlibatan politik warga negara. Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an partisipasi politik lebih diwakili oleh opini publik dan kepentingan publik. Hal ini disebabkan karena tumbuhnya gerakan kelompok komunitas dan individualitas warga negara. Perkembangan selanjutnya adalah berupa gerakan-gerakan sosial baru (*new social movements*) yang diakui sebagai bentuk partisipasi politik pada tahun 1970-an dan 1980-an. Contoh dari gerakan sosial baru ini adalah gerakan sosial perempuan untuk kesetaraan gender dan gerakan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer) untuk kesetaraan perlakuan HAM (Sobiakto & Ida, 2012, hal. 72; van Deth, 2021, hal. 4).

Pada dekade akhir abad ke-20, berkembangnya gerakan partisipasi politik yang bersifat sukarela (*voluntary*) terkait dengan semakin menghilangnya batasan antara ruang politik dan nonpolitik di dalam masyarakat dan menimbulkan apa yang disebut partisipasi politik sipil (*civil's political participation*). Kehadiran

media sosial mendorong partisipasi lebih jauh di mana publik dapat secara aktif ikut memproduksi pesan politik. Media sosial menjadi sarana untuk mengekspresikan opini dan sikap, menggalang solidaritas dan mempengaruhi agenda media (Sobiakto & Ida, 2012, hal. 73).

Konsep partisipasi politik karenanya mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya cara-cara orang berpartisipasi dalam politik. Van Deth (2021) mengidentifikasi delapan aturan dalam menentukan apakah sesuatu dapat disebut partisipasi politik. Delapan aturan tersebut berupa pertanyaan yang harus dijawab “iya” sebanyak empat kali. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut (hal-6-11).

- (1) Apakah itu tindakan atau aktivitas?
- (2) Apakah itu dilakukan secara sukarela?
- (3) Apakah pelakunya warga negara biasa/nonprofesional?
- (4) Apakah aktivitas itu berada di dalam lingkup pemerintahan/negara/politik?
- (5) Jika tidak, apakah aktivitas itu menasar lingkup pemerintahan/negara/politik?
- (6) Jika tidak, apakah aktivitas itu bertujuan menyelesaikan masalah komunitas atau kolektif?
- (7) Jika tidak, apakah aktivitas itu berada di dalam suatu konteks politik?
- (8) Jika tidak, apakah aktivitas itu digunakan untuk menunjukkan niatan dan tujuan politis?



Aturan-aturan ini merujuk pada kriteria bentuk-bentuk partisipasi politik yang diketahui dalam demokrasi. Bergantung pada bagaimana partisipasi politik didefinisikan, aturan-aturan ini dapat digunakan keseluruhan atau sebagian. Definisi minimalis partisipasi politik setidaknya menggunakan empat aturan pertama, sedangkan definisi yang lebih luas dapat menggunakan lebih banyak atau keseluruhan (van Deth, 2021, hal. 12).

Teorell et al. (2007) telah mengembangkan tipologi yang membagi partisipasi politik ke dalam lima dimensi atau mode partisipasi, meliputi (1) partisipasi elektoral (*voting*), (2) partisipasi konsumen, (3) aktivitas kepartaian, (4) aktivitas protes, dan (5) aktivitas kontak (*contacting*). Menurut tipologi ini, partisipasi politik meliputi aktivitas-aktivitas seperti disebutkan dalam tabel 1 (hal. 338-341, 344).

**Tabel 1. Mode partisipasi politik dan macam-macam aktivitasnya**

Mode partisipasi	Macam aktivitas
Partisipasi elektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan suara dalam pemilihan umum</li> <li>• Abstain (tidak memberikan suara) sebagai bentuk protes</li> </ul>
Aktivitas kepartaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi anggota sebuah partai politik</li> <li>• Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan partai politik</li> <li>• Mendonasikan uang ke sebuah partai politik</li> <li>• Melakukan kerja sukarela untuk sebuah partai politik</li> </ul>
Aktivitas kontak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkomunikasi dengan politisi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin komunikasi dengan sebuah organisasi</li> <li>• Berkomunikasi dengan aparatur sipil negara</li> <li>• Menjalin komunikasi dengan atau tampil di depan media</li> <li>• Menjalin komunikasi dengan ahli hukum atau lembaga hukum</li> </ul>
Partisipasi konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menandatangani petisi</li> <li>• Memboikot produk tertentu</li> <li>• Membeli produk tertentu sebagai bentuk dukungan</li> <li>• Mendonasikan uang atau beramal</li> </ul>
Aktivitas protes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpartisipasi dalam demonstrasi di muka umum</li> <li>• Berpartisipasi dalam pemogokan (atau boikot kelas)</li> <li>• Berpartisipasi dalam aktivitas protes ilegal</li> </ul>

### 1.5.7. Partisipasi Politik Daring

Partisipasi politik, meskipun utamanya dilakukan di dunia nyata (luring), dengan perkembangan teknologi digital, juga dilakukan secara daring. Brady, seperti dikutip Yang et al. (2020), mendefinisikan partisipasi politik daring sebagai ‘aktivitas politik yang terjadi di dalam suatu konteks daring’ (hal. 278). Menurut definisi ini, Yang et al. menyebutkan partisipasi politik daring meliputi aktivitas sebagai berikut:

- Mengirim tulisan/surat kepada politisi secara daring,
- Membuat kontribusi kampanye secara daring,

- Berpartisipasi dalam kelompok/grup politik daring,
- Mengirim pesan politik melalui surat elektronik,
- Menulis surat kepada editor sebuah situs berita. (hal. 301)

#### **1.5.8. Teori *Uses, Gratification, and Dependency***

Teori *Uses and Gratification* adalah salah satu teori komunikasi dari tradisi efek media. Sebagai bagian dari tradisi ini, teori *Uses and Gratification* menerima gagasan utamanya, yaitu interaksi seseorang dengan media menimbulkan efek/pengaruh tertentu terhadap seseorang itu (Littlejohn & Foss, 2007, hal. 298, 300). Tetapi tidak seperti teori-teori efek lainnya, ia menggeser fokus dari terpaan pesan kepada konsumsi media. Penggunaan media dipahami sebagai bagian dari pemenuhan tujuan atau kebutuhan tertentu terkait komunikasi. Seperti dijelaskan oleh Littlejohn & Foss (2007), pengguna media dipandang sebagai pihak yang aktif dan berorientasi tujuan. Mereka memilih media secara bertanggung jawab berdasarkan kebutuhan mereka. Asumsinya adalah ‘pengguna media tahu apa kebutuhannya dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut’ (hal. 301).

Teori ini menerapkan teori *Expectancy-Value* untuk memahami penggunaan media. Pemenuhan yang didapat dari penggunaan media ditentukan oleh sikap terhadap media, atau kepercayaan terkait apa yang ditawarkan media, dan evaluasi atas materi/konten-nya. Pilihan seseorang dalam konsumsi media, maka, ditentukan oleh evaluasi seseorang terhadap media tersebut (Littlejohn & Foss, 2007, hal. 301). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, radikalisme politik

yang menentukan cara pandang mengenai politik juga berperan menentukan cara pandang terhadap media. Evaluasi terhadap media didasarkan pada apakah media itu dapat memenuhi kebutuhan informasi terkait politiknya. Sementara literasi digital terkait dengan pengetahuan dan kecakapan yang diperlukan dalam penggunaan teknologi digital.

Maka, mereka yang teradikalisasi politik menggunakan teknologi digital atau *new media* berdasarkan kebutuhan/kepentingan politik mereka, khususnya sisi komunikasinya dalam hal informasi dan penyebarluasan pesan-pesan kritis dan perlawanan. Karena ada kesadaran akan perlunya partisipasi dalam upaya perubahan sosial, penggunaan media digital pun menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Informasi/pesan kritis dan perlawanan adalah penting untuk memberikan pengetahuan dan menumbuhkan keinginan seseorang untuk ikut serta dalam perjuangan perubahan. Dengan penerimaan yang lebih pada informasi semacam ini, seseorang akan menguatkan pengetahuan dan sikap politik yang berorientasi demikian, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku (partisipasi) politik.

Teori *Uses and Gratification* memiliki turunan, yaitu teori *Dependency*. Teori turunan ini menerima asumsi dari teori sebelumnya, tetapi memandang penggunaan media dapat menimbulkan ketergantungan (*dependency*) pada media tertentu. Littlejohn & Foss (2007) menjelaskan, berdasarkan Ball-Rokeach and DeFleur, terdapat dua faktor yang menentukan ketergantungan seseorang pada media, yaitu (1) ketergantungan pada media yang memenuhi banyak kebutuhan secara langsung dan (2) ketergantungan yang bersumber dari stabilitas sosial di

mana dalam situasi konflik dan perubahan sosial, ketergantungan pada media untuk informasi meningkat, sedangkan pada situasi yang stabil ketergantungan menurun (hal. 302).

Namun, teori *Dependency* sendiri menerima bahwa ketergantungan dapat dikurangi melalui interaksi dengan beragam alternatif/pilihan media untuk informasi. Internet atau teknologi digital memungkinkan pilihan-pilihan yang lebih luas dari apa yang dapat ditawarkan media lama/konvensional. Littlejohn & Foss (2007) menyebutkan bahwa ketergantungan seseorang akan sedikit jika seseorang itu memiliki banyak pilihan media dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi, keberadaan pilihan ini juga terkait faktor di luar diri seseorang seperti keberadaan akses (*availability*; hal 303). Misalnya, meskipun di banyak tempat internet telah tersedia, masih ada tempat-tempat tertentu yang internet dan bahkan listrik belum tersedia.

Peran literasi digital menemukan relevansi dalam teori *Dependency*. Teknologi digital menawarkan pilihan-pilihan media/saluran yang lebih beragam, tetapi agar dapat dimanfaatkan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan, memerlukan pengguna teknologi/media digital untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan tertentu terkait teknologi ini. Akses pada pilihan yang beragam ini penting karena mereka yang teradikalisasi melihat media/saluran arus utama sebagai bermasalah dan cenderung mengandalkan media/saluran alternatif. Kaum radikal menyadari bahwa pihak-pihak yang berkepentingan pada status quo memanfaatkan media/saluran arus utama yang sama untuk menjauhkan orang-

orang dari keterlibatan dengan politik perubahan. Kaum radikal dapat mengembangkan preferensi pada media/saluran tertentu tetapi bagaimanapun tetap berinteraksi dengan media/saluran arus utama (misalnya, untuk mengetahui kabar politik terkini) dan karenanya terpengaruhi oleh media secara berbeda dan beragam tingkatan.

Hubungan antara media dan politik telah banyak diketahui. Seperti disebutkan oleh Valkenburg et al. (2016) berdasarkan McLeod et al., penelitian komunikasi politik menemukan hubungan antara pemberitaan media dan perilaku memberikan suara yang dimediasi oleh sikap dan kepercayaan politik (hal. 17-18). Disebutkan juga berdasarkan Potter dan Potter & Riddle, dalam tradisi efek teori komunikasi, interaksi dengan media menimbulkan sejumlah efek, meliputi efek kognitif, emosional, sikap dan behavioral (hal. 5).

Radikalisme politik progresif dan literasi digital berperan dalam evaluasi seseorang terhadap media dan menentukan bagaimana interaksinya dengan media. Kecenderungan untuk mengandalkan media/saluran alternatif yang kontra-hegemoni membuat seseorang itu cenderung menerima informasi/pesan kritis dan perlawanan yang lebih sesuai dengan pandangan politiknya. Penerimaan ini akan menguatkan pengetahuan dan sikap politik seseorang itu yang berorientasi demikian, dan yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku (partisipasi) politiknya baik yang dilakukan di dunia nyata (luring) maupun yang dimediasi teknologi digital (daring).

## **1.6. Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh radikalisme politik progresif (X1) dan tingkat literasi digital (X2) terhadap tingkat partisipasi politik luring (Y1) dan daring (Y2).

## **1.7. Definisi Konseptual**

### **1.7.1. Radikalisme Politik Progresif**

Radikalisme politik progresif adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki orientasi berpolitik yang menentang cara berpolitik dan institusi politik yang mapan/ada, menggunakan strategi protes anti-sistem dari protes hingga kekerasan, serta mendukung kebebasan individu dan kolektif dalam masyarakat yang lebih setara/egalitarian.

### **1.7.2. Tingkat Literasi Digital**

Tingkat literasi digital adalah bobot kecakapan seseorang menggunakan teknologi digital dan pemahamannya untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis dan bertanggung jawab.

### **1.7.3. Tingkat Partisipasi Politik Luring**

Tingkat partisipasi politik luring adalah keterlibatan warga negara di dunia nyata dalam aktivitas yang mempengaruhi proses politik.

#### **1.7.4. Tingkat Partisipasi Politik Daring**

Tingkat partisipasi politik daring adalah keterlibatan warga negara dengan aktivitas politik yang dilakukan di dalam suatu konteks daring.

### **1.8. Definisi Operasional**

#### **1.8.1. Radikalisme Politik Progresif**

Radikalisme politik progresif dapat diukur menurut indikator berikut.

- Responden memiliki orientasi berpolitik yang menentang cara berpolitik dan institusi politik yang mapan/ada,
- Responden memiliki orientasi berpolitik yang menggunakan strategi anti-sistem dari protes hingga kekerasan politik, dan
- Responden memiliki orientasi berpolitik yang mendukung kebebasan individu dan kolektif dalam masyarakat yang lebih setara/egalitarian.

#### **1.8.1. Tingkat Literasi Digital**

Tingkat literasi digital dapat diukur menurut indikator berikut.

- Responden memiliki kecakapan terkait informasi dan literasi data,
- Responden memiliki kecakapan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi digital,
- Responden memiliki kemampuan berkomunikasi secara daring, dan
- Responden mengerti etika dalam menggunakan teknologi digital.



### **1.8.3. Tingkat Partisipasi Politik Luring**

Tingkat partisipasi politik luring dapat diukur menurut indikator berikut.

- Responden ikut serta dalam politik elektoral,
- Responden terlibat dalam aktivitas kepartaian,
- Responden melakukan aktivitas kontak,
- Responden melakukan partisipasi konsumen, dan
- Responden terlibat dalam aktivitas protes.

### **1.8.3. Tingkat Partisipasi Politik Daring**

Tingkat partisipasi politik daring dapat diukur menurut indikator berikut.

- Responden mengirim tulisan/surat kepada politisi secara daring,
- Responden membuat kontribusi kampanye secara daring,
- Responden berpartisipasi dalam kelompok/grup politik daring,
- Responden mengirim pesan politik melalui surat elektronik, dan
- Responden menulis surat kepada editor sebuah situs berita.

## **1.9. Metodologi Penelitian**

### **1.9.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori mencoba menjelaskan masalah dengan mencari variabel-variabel yang berkaitan.

Jenis penelitian eksplanatori bertujuan membuktikan hipotesis secara statistik (Babbie, 2021, hal. 92).

## **1.9.2. Populasi dan Sampel**

### **1.9.2.1. Populasi**

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah warga negara Indonesia berusia 17-30 tahun, berdomisili di kota Semarang, berpendidikan minimal sedang menempuh pendidikan SMA, dan menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari. Rentang usia ini dipilih karena meliputi kaum muda dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Usia minimal ditentukan 17 tahun karena merupakan syarat usia untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Domisili kota Semarang ditetapkan karena merupakan salah satu kota tempat berkembangnya gerakan sosial masyarakat sipil yang di dalamnya melibatkan kaum muda mahasiswa (Wansyah et al., 2021). Penggunaan internet disyaratkan karena penelitian terkait penggunaan media digital dan partisipasi politik daring. Ukuran populasi tidak diketahui.

### **1.9.2.2 Sampel**

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *non-probability sampling*. Karenanya, populasi tidak mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Teknik yang digunakan adalah sampling aksidental. Menurut teknik ini, siapapun yang ditemui di lapangan dapat menjadi responden asalkan memenuhi karakteristik yang telah ditentukan (Ardial, 2014, hal. 347-348). Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden berdasarkan

aturan *sample-to-variable ratio* 15:1. Menurut aturan ini, *ratio* minimal adalah 5:1, tetapi *ratio* lebih tinggi, seperti 15:1 dan 20:1, lebih disarankan terutama jika hanya ada beberapa variabel penelitian. Aturan sampel ini dapat digunakan dalam penelitian yang melakukan analisis multivariate dan regresi berganda (Memon et al., 2020, hal. iv).

### **1.9.3. Jenis dan Sumber Data**

Data untuk penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data yang pertama objek penelitian.

### **1.9.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Alat yang dipilih untuk mengumpulkan data adalah kuesioner atau angket. Teknik yang digunakan adalah metode kuesioner, yaitu penggunaan serangkaian pertanyaan yang tersusun secara sistematis untuk diisi oleh responden. Melalui kuesioner ini, responden menjawab pertanyaan berdasarkan alternatif jawaban yang telah tertera yang sesuai dengan keadaan responden (Neuman, 2016, hal. 121).

### 1.9.5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut.

a) *Editing*

Pada proses *editing*, setelah data dikumpulkan, data diperiksa untuk memastikan data-data yang didapat telah diperoleh secara lengkap dan benar.

b) *Coding*

Pada tahap *coding* atau pengkodean, data diklasifikasikan atau diberi identitas sehingga dapat dianalisis. Pengkodean dilakukan dengan dua cara, yaitu pengkodean frekuensi untuk data yang memiliki frekuensi atau bobot dan pengkodean lambang untuk data yang tidak.

c) *Tabulating*

Tahap terakhir adalah tabulasi, yaitu pemasukan data-data pada tabel-tabel dan pengaturan angka-angka serta penghitungan. Jenis tabel yang digunakan adalah tabel data dan tabel kerja. Tabel data mendeskripsikan data agar struktur data dapat dipahami, sedangkan tabel kerja digunakan untuk menganalisis data-data (Sarantakos, 2012, hal. 405-412).

#### **1.9.6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan teknik Analisis Regresi Multivariate. Teknik analisis regresi multivariat adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana beberapa variabel dependen dijelaskan oleh suatu atau beberapa variabel independen (Tranmer et al., 2020, hal. 10). Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak PSPP, Jamovi, dan LibreOffice Calc.